The Role of Internal Audit and Risk-Based Audit in Improving Local Government Financial Accountability

Aulia Rizka Sofa[1], Nancy Marbun[2], Dealova Venolika Br Sembiring[3], Vivi Febyani Sebayang[4], Dito Aditia Darma Nst[5]
[1,2,3,4,5]Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia
Email: sofaawlia19@gmail.com; nancyseptriasamrbn@gmail.com; dealovavenolika@gmail.com; vivifebyanisebayang1122@gmail.com; ditoaditia@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit internal dan penerapan audit berbasis risiko dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Audit internal berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi, sementara audit berbasis risiko menekankan identifikasi serta mitigasi risiko utama yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode konseptual-deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, standar audit sektor publik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sinergi antara audit internal yang efektif dan penerapan audit berbasis risiko mampu memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan kualitas pengawasan, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui penerapan e-audit dan analisis data digital berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi proses audit. Dengan demikian, kombinasi audit internal dan audit berbasis risiko merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Keyword: Audit Berbasis Risiko; Akuntabilitas Keuangan; Pemerintah Daerah; Tata Kelola Keuangan; Transparansi

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of internal audit and the implementation of risk-based audits in improving local government financial accountability. Internal audit serves as a supervisory instrument that ensures regional financial management is carried out in accordance with the principles of transparency, efficiency, and regulatory compliance, while risk-based audits emphasize the identification and mitigation of key risks that have the potential to hinder the achievement of organizational goals. This study uses a qualitative approach with a conceptual-descriptive method through a literature review of laws and regulations, public sector audit standards, and relevant previous research findings. The analysis results indicate that the synergy between effective internal audit and the implementation of risk-based audits can strengthen the internal control system, improve the quality of supervision, and minimize the potential for irregularities in regional financial management. In addition, the use of information technology through the implementation of e-audit and digital data analysis contributes to increasing the efficiency, accuracy, and transparency of the audit process. Thus, the combination of internal audit and risk-based audit is a strategic instrument in realizing accountable, transparent, and integrity-based local government financial governance.

Keyword: Risk-Based Audit; Financial Accountability; Local Government; Financial Governance; Transparency

Corresponding Author:
Aulia Rizka Sofa,
Universitas Pembangunan Panca Budi,
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Sei Sikambing 20122. Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia
Email: sofaawlia19@gmail.com

1. INTRODUCTION

Dalam era reformasi birokrasi dan tuntutan *good governance*, akuntabilitas keuangan pemerintah daerah menjadi salah satu aspek krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola sumber daya publik secara efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, realitas menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan publik, seperti penyimpangan anggaran, rendahnya kualitas laporan keuangan, serta lemahnya sistem pengendalian internal. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya kerap menyoroti temuan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan, kesalahan penyajian laporan, serta potensi kerugian daerah akibat lemahnya pengawasan keuangan (Suci, 2025).

Salah satu instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah audit internal (Faisal, 2025). Audit internal memiliki peran strategis dalam memberikan keyakinan objektif bahwa seluruh kegiatan keuangan dan operasional telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Fungsi audit internal tidak hanya sebagai alat pendeteksi kesalahan, tetapi juga sebagai sarana konsultatif dalam membantu manajemen memperbaiki proses dan sistem pengendalian internal. Menurut Demeri *et al.* (2025), kualitas hasil audit internal sangat dipengaruhi oleh kompetensi, integritas, dan independensi auditor. Semakin tinggi kualitas audit internal, semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Namun demikian, tantangan utama dalam pelaksanaan audit sektor publik saat ini adalah keterbatasan sumber daya, luasnya area audit, serta meningkatnya kompleksitas kegiatan pemerintahan. Kondisi tersebut menuntut penerapan pendekatan audit yang lebih adaptif dan berbasis risiko. Audit berbasis risiko (*risk-based auditing*) muncul sebagai pendekatan modern yang menitikberatkan pada area-area yang memiliki potensi risiko tertinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Melalui audit berbasis risiko, auditor tidak hanya memeriksa kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga menganalisis faktor-faktor penyebab risiko yang dapat mengganggu efektivitas tata kelola dan pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya audit serta memperkuat fokus pengawasan pada bidang-bidang yang paling kritis (Nabila & Maulana, 2025).

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, sistem audit sektor publik juga mengalami transformasi digital. Penerapan *e-audit* dan sistem informasi pengawasan berbasis data memungkinkan auditor untuk memantau transaksi keuangan secara *real-time*, melakukan analisis risiko secara otomatis, serta mempercepat proses pelaporan hasil audit. Penelitian oleh Harahap & Lubis (2025) menegaskan bahwa digitalisasi audit publik mampu meningkatkan efisiensi pemeriksaan, akurasi data, dan transparansi hasil audit, khususnya pada pemerintah daerah yang memiliki tingkat kompleksitas dan risiko pelaporan yang tinggi.

Kombinasi antara audit internal yang berkualitas dan penerapan audit berbasis risiko diyakini dapat menciptakan sistem pengawasan keuangan daerah yang lebih efektif dan akuntabel (Nisaa *et al.*, 2024). Audit internal berperan sebagai fondasi pengendalian dan evaluasi berkelanjutan, sementara audit berbasis risiko memperkuat fokus pengawasan pada area dengan potensi penyimpangan terbesar. Melalui sinergi keduanya, pemerintah daerah dapat lebih cepat mengidentifikasi risiko keuangan, memperbaiki kelemahan sistem, serta meningkatkan keandalan laporan keuangan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran audit internal dan audit berbasis risiko dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pengawasan publik yang tidak hanya bersifat reaktif terhadap kesalahan, tetapi juga proaktif dalam mencegah risiko serta memperkuat tata kelola keuangan daerah menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

2. LITERATURE REVIEW

A. Audit Internal dan Akuntabilitas

Audit internal memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan efektivitas pengelolaan keuangan di sektor publik. Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal, audit internal berfungsi memberikan penilaian yang independen dan objektif terhadap kegiatan operasional serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam konteks pemerintah daerah, audit internal tidak hanya berperan dalam menemukan kesalahan atau penyimpangan, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola keuangan.

Kompetensi auditor dan independensi pelaksanaan audit internal memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas audit dan akuntabilitas keuangan. Auditor yang memiliki kompetensi teknis tinggi serta pemahaman terhadap karakteristik organisasi sektor publik mampu mengidentifikasi risiko keuangan secara lebih tepat dan memberikan rekomendasi yang relevan. Selain itu, pelaksanaan audit internal yang konsisten dan profesional berkontribusi besar terhadap peningkatan kepercayaan publik karena mampu

menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Suci, 2025).

B. Audit Berbasis Risiko

Audit berbasis risiko (*risk-based auditing*) merupakan pendekatan modern dalam pelaksanaan audit yang berfokus pada area-area dengan potensi risiko terbesar terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks audit sektor publik, pendekatan ini memungkinkan auditor memanfaatkan sumber daya audit secara lebih efektif dengan menetapkan prioritas pada aktivitas yang paling rawan terhadap kesalahan atau penyimpangan.

Penerapan audit berbasis risiko di sektor publik terbukti meningkatkan efisiensi pelaksanaan audit serta mempercepat deteksi permasalahan keuangan sebelum berkembang menjadi penyimpangan yang lebih besar. Selain itu, pendekatan ini membantu auditor memahami konteks organisasi secara menyeluruh, termasuk faktor eksternal seperti kebijakan fiskal, kondisi ekonomi, dan perubahan regulasi (Rasyida *et al.*, 2025). Penelitian oleh Batfamah & Pramukti (2024) menunjukkan bahwa audit berbasis risiko berkontribusi positif terhadap penguatan pengendalian keuangan dan pengurangan risiko *fraud*, karena auditor dapat lebih fokus pada area berisiko tinggi yang berpotensi menimbulkan kerugian daerah. Dengan demikian, audit berbasis risiko dapat dipandang sebagai inovasi penting dalam praktik audit publik modern yang menekankan pencegahan dan mitigasi risiko, bukan sekadar pemeriksaan kepatuhan.

C. Kualitas Audit dan Transparansi

Kualitas audit publik merupakan salah satu faktor utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan pemerintah. Audit yang dilaksanakan secara profesional, independen, dan sesuai dengan standar yang berlaku akan meningkatkan kredibilitas hasil pemeriksaan serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dalam konteks pemerintah daerah, hasil audit yang berkualitas menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan strategis, baik oleh pimpinan daerah maupun lembaga legislatif (Siagian & Silviana, 2025).

Menurut Nurhikmah & Sisdianto (2024), terdapat hubungan positif antara kualitas audit dan tingkat transparansi pelaporan keuangan pemerintah. Audit dengan kualitas tinggi tidak hanya mampu mendeteksi kesalahan material, tetapi juga berperan dalam memperbaiki proses penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan prinsip relevansi dan keandalan informasi. Hal ini pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah serta meningkatkan legitimasi lembaga pemerintahan dalam mengelola dana publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas audit perlu menjadi prioritas utama dalam reformasi tata kelola keuangan daerah.

D. Peran Teknologi dalam Audit Publik

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia audit, termasuk audit sektor publik. Digitalisasi audit melalui penerapan *e-audit*, *data analytics*, dan *computer-assisted audit techniques* (CAATs) memungkinkan auditor melakukan pemeriksaan dengan cakupan yang lebih luas serta tingkat akurasi yang lebih tinggi. Teknologi ini tidak hanya mempermudah proses pengumpulan dan analisis data, tetapi juga memungkinkan audit dilakukan secara *real-time*, sehingga potensi penyimpangan dapat segera terdeteksi (Nisaa *et al.*, 2024).

Penelitian oleh Salihi (2024) menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi audit publik mampu mempercepat proses pemeriksaan, meningkatkan efisiensi kerja auditor, serta memperkuat validitas hasil audit. Dengan dukungan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, auditor dapat melacak aliran dana publik secara langsung dan mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan. Di sisi lain, audit digital juga meningkatkan transparansi karena hasil audit terdokumentasi secara otomatis dan lebih mudah diakses oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam audit publik tidak hanya merupakan kebutuhan teknis, tetapi juga strategi penting dalam meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah.

3. RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode konseptual-deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis hubungan antara pelaksanaan audit internal dan penerapan audit berbasis risiko dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini tidak berorientasi pada pengujian hipotesis statistik, melainkan pada pengembangan pemahaman konseptual yang didukung oleh temuan-temuan empiris dari penelitian terdahulu.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan, standar audit sektor publik, serta artikel jurnal nasional yang membahas akuntabilitas keuangan daerah, audit internal, audit berbasis risiko, kualitas audit, dan *good governance*. Regulasi yang menjadi rujukan utama antara lain Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga melakukan sintesis terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan, baik yang menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian-penelitian tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi metode yang digunakan, objek atau sampel penelitian, serta temuan utama yang berkaitan dengan peran audit internal, audit berbasis risiko, kompetensi auditor, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Sintesis ini bertujuan untuk memperkuat analisis konseptual dengan bukti empiris yang telah dihasilkan oleh penelitian sebelumnya.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan, membandingkan, dan menginterpretasikan konsep, regulasi, serta temuan penelitian terdahulu guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme penguatan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menjelaskan secara konseptual bagaimana sinergi antara audit internal yang efektif dan penerapan audit berbasis risiko dapat mendukung peningkatan transparansi, keandalan, serta pertanggungjawaban keuangan sektor publik.

Hasil analisis konseptual yang didukung oleh penelitian terdahulu ini diharapkan mampu menghasilkan kerangka pemikiran yang aplikatif serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

4. RESULTS AND DISCUSSION

Implementasi audit internal dan penerapan audit berbasis risiko memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Audit internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian yang memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks sektor publik, efektivitas audit internal sangat ditentukan oleh kemampuan auditor dalam mengidentifikasi risiko serta menyesuaikan prosedur pemeriksaan dengan tingkat risiko yang dihadapi.

Hasil sintesis penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan daerah masih menjadi permasalahan yang kompleks. Penelitian Faisal (2025) mengungkapkan bahwa rendahnya kualitas akuntabilitas keuangan daerah dipengaruhi oleh lemahnya sistem pengawasan internal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya sistem integrasi pengelolaan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan sistem pelaporan keuangan belum sepenuhnya mampu menjamin terciptanya akuntabilitas apabila tidak didukung oleh fungsi pengawasan internal yang efektif.

Penelitian oleh Arman *et al.* (2023) memberikan bukti empiris bahwa penerapan audit berbasis risiko mampu meningkatkan kualitas audit internal. Audit berbasis risiko terbukti memperkuat skeptisisme profesional auditor dalam menghasilkan audit yang lebih berkualitas. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendekatan audit tradisional yang bersifat rutin dan administratif perlu dialihkan menuju pendekatan yang lebih strategis dengan memfokuskan pengawasan pada area berisiko tinggi. Dengan demikian, audit berbasis risiko menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas audit internal pemerintah daerah.

Selain pendekatan audit, faktor sumber daya manusia auditor juga berperan signifikan dalam menentukan kualitas audit. Penelitian Marlina *et al.* (2022) menunjukkan bahwa profesionalisme, independensi, dan kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Meskipun penelitian tersebut dilakukan pada auditor eksternal, temuan ini tetap relevan dalam konteks audit internal pemerintah daerah. Auditor internal yang memiliki kompetensi dan independensi yang memadai akan lebih mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan profesional, sehingga mendukung peningkatan akuntabilitas keuangan daerah.

Dari perspektif sistem akuntabilitas kinerja, penelitian Fauzi *et al.* (2021) menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Indonesia masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (*outcome*). Lemahnya pemanfaatan hasil evaluasi serta kurangnya pengawasan internal menyebabkan akuntabilitas publik belum berjalan secara optimal. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas sistem akuntabilitas kinerja memerlukan dukungan audit internal yang kuat dan berbasis risiko agar dapat berfungsi sebagai alat pengendalian manajerial yang efektif.

Hasil penelitian Nurjanah *et al.* (2020) pada Pemerintah Kota Cirebon semakin memperkuat temuan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah telah diterapkan, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya pengawasan internal. Akuntabilitas keuangan masih lebih berfokus pada pemenuhan aspek administratif dibandingkan pencapaian kinerja dan hasil yang nyata. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan audit internal dan penerapan audit berbasis risiko merupakan kebutuhan mendesak dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil sintesis dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah memerlukan sinergi antara audit internal yang efektif, penerapan audit berbasis risiko, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia auditor. Audit internal yang didukung oleh pendekatan berbasis risiko tidak hanya mampu meningkatkan kualitas audit, tetapi juga berperan strategis dalam memperkuat transparansi, pencatatan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dengan demikian, audit internal dan audit berbasis risiko menjadi elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

5. CONCLUSION

Akuntabilitas keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara transparan, efektif, dan berorientasi pada kinerja. Namun demikian, berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan daerah masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti lemahnya sistem pengawasan internal, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem akuntabilitas kinerja.

Audit internal memiliki peran strategis sebagai mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Audit internal yang efektif mampu memperkuat sistem pengendalian intern, menilai tingkat kepatuhan terhadap regulasi, serta memberikan rekomendasi perbaikan bagi manajemen keuangan daerah. Namun demikian, efektivitas audit internal sangat dipengaruhi oleh kualitas auditor, khususnya dari aspek profesionalisme, independensi, dan kompetensi.

Dalam menghadapi kompleksitas risiko pengelolaan keuangan daerah, pendekatan audit tradisional yang bersifat rutin dan administratif dinilai kurang memadai. Oleh karena itu, penerapan audit berbasis risiko menjadi pendekatan yang relevan untuk meningkatkan kualitas audit internal. Audit berbasis risiko memungkinkan auditor memfokuskan pengawasan pada area-area yang memiliki tingkat risiko dan potensi penyimpangan tertinggi, sehingga proses audit menjadi lebih efisien dan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi organisasi. Penerapan audit berbasis risiko yang didukung oleh auditor internal yang kompeten dan profesional diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah daerah. Sinergi antara audit internal yang efektif dan audit berbasis risiko akan mendorong peningkatan kualitas audit, memperkuat sistem pengendalian internal, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan demikian, penguatan audit internal dan penerapan audit berbasis risiko dipandang sebagai faktor kunci dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

REFERENCES

Batfamah, S. A. R., & Pramukti, M. A. (2024). Penerapan audit berbasis risiko sebagai pemoderasi pengaruh skeptisisme profesional auditor dan tekanan waktu terhadap kualitas audit pada kantor inspektorat daerah Kabupaten Wajo. *SEIKO: Journal of Management & Business*, *7*(2.1), 1248-1250. https://doi.org/10.37531/sejaman.v7i2.8027

Demeri, D., Nurfitriani, A. F., Amalia, A., Halim, H., & Daryati, Y. (2025). Transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan pemerintah daerah: Studi kasus di Kota Cirebon. *YUME: Journal of Management*, *8*(2), 235-240. https://doi.org/10.37531/yum.v8i2.8679

Faisal, H. (2025). Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. *Bappenas Working Papers*, *8*(3), 460-484. https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.411

Harahap, R. Y., & Lubis, R. H. (2025). Peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi audit keuangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan*, *1*(3), 558-561.

Nabila, P., & Maulana, I. (2025). Efektivitas audit kinerja sektor publik dalam mewujudkan good governance melalui akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. *Jamanta: Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita*, *5*(1), 1-11. https://doi.org/10.36563/jamanta.v5i1.1517

Nisaa, R. K., Bahrim, S. M. S., & Kustiwi, I. A. (2024). Teknologi digital dan transformasi internal audit terhadap perlakuan laporan keuangan: Studi literatur. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, *2*(2), 263-277. https://doi.org/10.55606/jumia.v2i2.2596

Nurhikmah, A. H., & Sisdianto, E. (2024). Peran akuntan dalam membangun kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perspektif etika. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *2*(11), 1-15. https://doi.org/10.62281/v2i11.1053

Rasyida, K. F., Ningrum, L. W. M., Fatimah, M. S., Oktaviani, V. N., & Amrulloh, A. (2025, June). Audit berbasis risiko: Pendekatan baru dalam audit. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis* (Vol. 2, pp. 156-161).

Salihi, S. S. (2024). Peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas audit internal. *JITAA: Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, *3*(2), 140-148. https://doi.org/10.62668/jitaa.v3i2.1407

Siagian, E. P., & Silviana, S. (2025). Pengaruh profesionalisme, independensi, dan kompetensi auditor terhadap kualitas audit di Kantor Akuntan Publik DKI Jakarta. *Journal of Economics and Business UBS*, *14*(5), 1138-1158. https://doi.org/10.52644/yqgdeb58

Suci, S. R., Jumiati, J., & Saputra, B. (2025). Implementasi akuntabilitas publik dalam mewujudkan good governance: Analisis sistem SAKIP dan kerangka regulasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, *2*(4), 1161-1165. https://doi.org/10.62379/jiksp.v2i4.2742